

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2024 TANGGAL 31 DESEMBER 2024

TENTANG

PENANGANAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta

Jalan Flamboyan No. 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Telepon: 0264-218016
Kabupaten Purwakarta

PENGESAHAN

- 1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan KPU Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
- 3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- 4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- 7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penanganan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
- 8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Purwakarta Pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

DIAN HADIANA



Nomor SOP : 10 TAHUN 2024 Tanggal Pengesahan : 31 Desember 2024 Disahkan Oleh : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA, DIAN HADIANA Nama SOP : Penanganan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik di Lingkungan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA	Nama SOP		DIAN HADIANA Penanganan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta			
DASAR HUKUM:		KU	ALIFIKASI PELAKSANA:			
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1.	Memahami jenis dokumen informasi publik;				
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Ta Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		Memahami alur permohonan informasi publik melalui PPID;				
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perub Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;						
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentar Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaria Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah did dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan K Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan S Umum Kabupaten/Kota;						
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pe Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pe Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum I	an Umum Kabupaten/Kota 2024 tentang Perubahan atas dayanan Informasi Publik di					
KETERKAITAN:	PEI	RALATAN / PERLENGKAPAN:				
SOP Permohonan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	(PPID) di Lingkungan Komisi	1.	Gawai;			
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta		2.	Printer dan scanner;			
2. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabu	paten Purwakarta		Jaringan Internet.			
PERINGATAN:	C. Berlin, M. C. Conner, Co.	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
	Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan dalam bentunaskah asli (hardcopy) dan naskah elektronik (softcopy).					

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

) KEGIATAN / AKTIVITAS	AKTOR / PELAKSANA					MUTU BAKU				
NO		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	PEMBINA PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengajukan formulir keberatan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak atau ditemukan alasan keberatan lainnya dengan mencantumkan alasan pengajuan keberatan berupa: a. penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi;										
	b. tidak disediakannya informasi publik secara berkala; c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik; d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dikabulkannya permohonan informasi publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan KPU.						Identitas Pemohon	10	menit	Formulir Pengajuan Keberatan	
2	Melengkapi formulir keberatan dan mengirimkan formulir keberatan ke: a. Kantor KPU Kabupaten Purwakarta; b. E-mail PPID; atau c. https://purwakartakabppid.kpu.go.id/formulir-keberatan						Formulir Pengajuan Keberatan	20	menit	- Formulir Pengajuan Keberatan - Tanda Bukti Permohonan	
3	Memberikan nomor registrasi pendaftaran pengajuan keberatan, menyimpan salinan formulir permohonan Informasi Publik yang diajukan sebagai lampiran tanda bukti permohonan, dan memberikan tanda bukti pengajuan keberatan kepada Pemohon						Formulir Pengajuan Keberatan	5	menit	Salinan Formulir Pengajuan Keberatan	
4	Mencatat pengajuan keberatan atas Permohonan Informasi Publik dalam buku register keberatan						Formulir Permohonan Informasi	5	menit	Buku Register Keberatan	
5	Memeriksa formulir keberatan yang diajukan dengan memeriksa keabsahan identitas pemohon informasi dan muatan formulir keberatan		tidak	lengkap			Formulir Pengajuan Keberatan	1	jam	Formulir Pengajuan Keberatan	
6	Memberikan tanggapan secara tertulis yang paling sedikit memuat: a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan c. disertai surat keputusan KPU mengenai Informasi Publik yang dikecualikan (jika permohonan informasi ditolak) J. Surat keputusan KPU mengenai Informasi Publik yang dikecualikan (jika permohonan informasi Publik yang dikecualikan (jika permohonan informasi ditolak)						- Formulir Pengajuan Keberatan - Peraturan KPU - Peraturan Perundang-Undangan	1	hari	Konsep Pemberitahuan Tertulis	- Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja saat Non-Tahapan Pemilu dan Pemilihan - Maksimal 3 (tiga) hari kerja saat Tahapan Pemilu dan Pemilihan.
7	Memberikan pertimbangan atas pemberian tanggapan keberatan permohonan informasi (jika diperlukan)						- Formulir Pengajuan Keberatan - Peraturan KPU - Peraturan Perundang-Undangan	1	hari	Konsep Pemberitahuan Tertulis	
8	Menerbitkan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan						Konsep Pemberitahuan Tertulis	1	jam	Pemberitahuan Tertulis yang sudah ditandatangani	
9	Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan disertai tanda terima	V					Pemberitahuan Tertulis atas Tanggapan Keberatan yang diajukan	10	menit	- Pemberitahuan Tertulis atas Tanggapan Keberatan yang diajukan - Tanda Terima	
10	Menerima tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan disertai tanda terima		Ù				- Pemberitahuan Tertulis - Tanda Terima	1	jam	Tanda Terima	

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	AKTOR / PELAKSANA					VET				
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	PEMBINA PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	KET
11	Mencatat status proses permohonan informasi Publik telah selesai						- Formulir Pengajuan Keberatan - Identitas Pemohon - Pemberitahuan Tertulis - Tanda Terima	10	menit	Buku Register Keberatan	

Normal waktu: 1 Hari 4 Jam